

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budiyono, Tri, 2011, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas*, Cetakan Pertama, Griya Media, Salatiga
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perusahaan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta.
- Kohar, A, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 2014, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnamasari, Irma Devita, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Perusahaan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI, Jakarta.
- Soemoatmodjo, Soetardjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua Balai Pustaka, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, edisi 1-4, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, cetakan ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## B. Tesis

Pristiawati, Lina, 2010, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penunjang Kegiatan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syarief, Saharuddin, 2010, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keterlambatan Pengajuan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

#### **D. Jurnal/Artikel/Penelitian**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2011, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, BPHN Kemenkumham RI